

## **PERAN *WORK-BASED LEARNING* DALAM MENYIAPKAN TENAGA KERJA DI ERA MEA**

Oleh: Suyitno, [vitnoback@yahoo.com](mailto:vitnoback@yahoo.com)

Universitas Muhammadiyah Purworejo

### **Abstrak**

Menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 dikatakan bahwa pemerintah masih harus menghadapi persoalan besar di sektor tenaga kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia lantaran ketidaksesuaian antara batasan pendidikan dengan bidang pekerjaan yang tengah dibutuhkan oleh para pengusaha. Rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadikan pemerintah dirasa perlu mengubah paradigma pendidikan agar tenaga kerja berpendidikan memiliki kompetensi untuk bekerja dan siap bekerja, (Okezone 30 April 2014). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil pembelajaran. Proses akan menempa peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Salah satu cara yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan pembelajaran berbasis kerja atau biasa disebut *Work-Based Learning* (WBL). WBL merupakan pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran yang ada di kelas dan di industri. WBL merupakan salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk memadukan mata pelajaran akademik dengan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. SMK merancang bersama-sama aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di dunia kerja. Dalam aplikasinya, WBL dilaksanakan di SMK dengan melaksanakan praktik kerja industri. diprediksi akan berdampak pada perbaikan pelaksanaan praktik kerja industri. Dengan demikian, WBL dapat menjadi acuan bagi SMK khususnya kompetensi teknik kendaraan ringan untuk melaksanakan praktik kerja industri sesuai dalam WBL yang akan dilakukan.

**Kata Kunci:** *Work-Based, learning, kesiapan, kerja*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu dan siap pula melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan (vokasi), memiliki nilai yang khas yakni adanya hubungan antara perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan nilai kekaryaannya

(jabatan), khususnya terkait dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja (Kuswana, 2013: 157). Dari ketiga aspek tersebut, diperoleh secara bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Apabila dari salah satu tersebut diabaikan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan kejuruan.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah : (1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompentensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan keahlian yang dipilih (Depdiknas, 2004: 7)

Filosofi pendidikan kejuruan pada aliran esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, dan sebagainya (Wardiman, 1988: 41). Jika dikaitkan dengan ekonomi, diharapkan dapat memperbaiki kualitas menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan ketenagakerjaan, dapat menjadi pemasok tenaga kerja yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Jika dikaitkan dengan sosial, dapat menjadi perubahan sosial yang akan menjadikan masyarakat dari sektor sosial yang makmur dan sejahtera.

Menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, seperti pada Okezone 30 April 2014, dikatakan bahwa pemerintah masih harus menghadapi persoalan besar di sektor tenaga kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia lantaran ketidaksesuaian antara batasan pendidikan dengan bidang pekerjaan yang tengah dibutuhkan oleh para pengusaha. Rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadikan pemerintah dirasa perlu mengubah paradigma pendidikan agar tenaga kerja berpendidikan memiliki kompetensi untuk bekerja dan siap bekerja.

Di sisi lain, rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadikan banyaknya pengangguran di Indonesia. Menurut data dari *International Monetary Fund* (IMF): *World Economic Outlook* pada April 2013 yang diolah BPS (Badan Pusat Statistik), disebutkan bahwa tingkat pengangguran tahun 2012 negara Indonesia 5,0%; Malaysia 3,0%; Singapura 2,0%; dan Thailand 0,5%. Di Indonesia, banyaknya pengangguran lebih disebabkan oleh besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, struktur lapangan kerja tidak seimbang, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja angkatan daerah tidak seimbang, serta kompetensi calon pekerja yang tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh dunia kerja.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil pembelajaran. Proses akan menempa peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kualitas lulusan menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan kejuruan. Seperti yang di ungkapkan Finch (1999: 14):

*The ultimate success of a vocational and technical curriculum is not measured merely through student educational achievement but through the result of that achievement-result that take the form of performance in the work world. Thus, the vocational and technical curriculum is oriented toward process (experience and activities within the school setting) and product (effect of these experiences and activities on former student).*

Diberlakukanya *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean Free Labour Area* (AFLA) menuntut negara Indonesia bersaing dengan negara lain. Tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain dengan meningkatkan kompetensi pada individu dan kelompok. Jika kompetensi di tingkatkan maka paling tidak tenaga kerja Indonesia tidak menjadi tenaga kerja yang di bawah negara-negara lainnya.

Mengacu pada *real jobs*, WBL memiliki karakteristik antara lain: hubungan antara mitra Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) dengan institusi pendidikan, secara khusus dijalin untuk membangun dan membantu

pembelajaran, di sini siswa dilibatkan sebagai pekerja yang bekerja sesuai dengan pekerjaan pekerja dalam industri, program dalam WBL mengikuti segala yang dibutuhkan di tempat kerja dan yang dibutuhkan oleh siswa, level pendidikan dalam program dibangun setelah siswa memiliki kompetensi yang diakui yang telah dilakukan di sekolah asal. WBL memberikan tantangan untuk memenuhi kebutuhan siswa di masa yang akan datang dan perusahaan itu sendiri, institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan kesepakatan dalam program dengan menghargai standar dan level yang telah ditetapkan. (Boud & Solomon, 2003). Dengan demikian dirasa perlu untuk menerapkan Work Based Learning pada tataran SMK untuk menyiapkan kerja siswa ketika berada di industri.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Work-Based Learning***

Brite (2013: 2) mendefinisikan bahwa *Work-Based Learning* (WBL) merupakan pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran yang ada di kelas dan di industri. Mereka merancang bersama-sama aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di dunia kerja. Dalam aplikasinya, WBL dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan melaksanakan praktik kerja industri. Raelin (2008: 2) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis dunia kerja merupakan penggabungan pembelajaran teori dengan praktik dan pengetahuan dengan pengalaman. Siswa dapat belajar langsung dari pengalaman praktik yang terencana sesuai dengan program keahlian yang diminati.

David & Solomon (2003: 5) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pekerjaan merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk mengintergrasikan mata pelajaran akademik dengan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan.

### ***Work-Based Learning* dalam Konteks Praktik kerja industri**

Penyelenggaraan PSG dibakukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Isi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memuat komponen-komponen yang diperlukan dalam

penyelenggaraan PSG. Inti dari program ini adalah upaya untuk mendekatkan pendidikan kejuruan ke dunia usaha/industri.

PSG pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Pada hakekatnya PSG merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan ini adalah strategi proaktif yang menuntut perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK, masyarakat dan dunia usaha/industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut.

Hal-hal mengenai praktik kerja menurut Hamalik (2005: 91) adalah sebagai berikut: (1) praktik kerja merupakan suatu tahap dalam rangka membentuk tenaga manajemen yang profesional, (2) praktik kerja wajib diikuti oleh para peserta pelatihan manajemen yang telah mempelajari teori-teori yang relevan dengan bidang pekerjaan manajemen, (3) praktik kerja dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu, (4) praktik kerja tersebut bertujuan mengembangkan kemampuan profesional aspek keterampilan manajemen sesuai dengan tujuan program pelatihan yang hendak dicapai, (5) praktik kerja berlangsung di lapangan, misalnya di lingkungan perusahaan, instansi pemerintah, institusi masyarakat sesuai dengan jenjang dan jenis manajemen yang dilatihkan itu, (6) para peserta dibimbing oleh administrator atau supervisor yang telah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) secara umum bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta industri pasangan
- 2) menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja
- 3) menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan

- 4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan
- 5) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang ada di dunia kerja

Tujuan program sistem ganda secara lingkup lebih sempit (individu) akan memberikan manfaat antara lain:

- 1) memberikan bekal keahlian yang profesional untuk terjun kelapangan kerja dan untuk bekal pengembangan dirinya secara berkelanjutan,
- 2) rentang waktu untuk mencapai keahlian professional lebih singkat, karena setelah tamat prakerin tidak perlu latihan lanjutan untuk mencapai keahlian siap pakai, dan
- 3) keahlian yang diperoleh dari program prakerin dapat mengangkat harga dan percaya diri dalam mendorong mereka untuk meningkatkan keahliannya pada tingkat yang lebih tinggi (Wardiman, 1998: 90).

Pendidikan sistem ganda dalam konteks praktik kerja industri akan memberikan manfaat bagi siswa, yakni.

- 1) Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan sesuai bidang yang diambilnya dalam situasi lapangan yang aktual. Hal ini penting dalam rangka belajar menerapkan teori atau konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya.
- 2) Memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada siswa sehingga hasil praktik kerja bertambah luas.
- 3) Siswa berkesempatan memecahkan berbagai masalah di lapangan dengan mendayagunakan pengetahuannya.
- 4) Mendekatkan dan menjembatani penyiapan siswa untuk terjun ke bidang tugasnya setelah menempuh pendidikan di sekolah.

Dalam bab v kerjasama pasal 11 dinyatakan bahwa SMK dan Industri Pasangan (IP) menyusun dan menyepakati program kerjasama penyelenggaraan pendidikan sistem ganda yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut mengatur kegiatan, waktu, peserta instruktur, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan pasal 28 menetapkan bahwa pengawasan PSG dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menjaga dan

meningkatkan mutu PSG. Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa pengembangan PSG dilakukan melalui perbaikan, perluasan, pedalaman, dan penyesuaian PSG terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan ketenagakerjaan.

Konsep yang sama juga muncul pada *work based learning* bentuk *apprenticeship*. Konsep tersebut antara lain (Brite, 2013) : 1) *apprenticeship* adalah sebuah konsep magang yang ingin meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja, 2) Program sekolah melalui praktik kerja industri memerlukan keterlibatan pengusaha, asosiasi pekerja, atau para pekerja dan serikat pekerja yang memberi kesempatan para siswa sekolah menengah/mahasiswa untuk berperan serta pada program magang untuk persyaratan menyelesaikan kelulusan (Naylor, 1997), 3) *apprenticeship* adalah program yang ingin mempelajari kompetensi yang selama ini belum pernah didapat, 4) WBL menjadi bagian dari pendekatan sekolah untuk mendekati ke dunia kerja, WBL *"is a part of a three-pronged approach to school-to-work transition that also includes school-based learning and connecting activities"* Naylor (Cunningham, Dawes, & Bennett, 2004: 6), 4) Kompetensi yang dilatihkan dalam *apprenticeship* disepakati antara pekerja dengan perusahaan penyelenggara program.

*Fundamental qualities such as the written agreement, the skills acquired, the value attached to credentials earned, curricula content that is defined by the workplace, wage requirements, and the implicit social contract that exist between program sponsors and their participants distinguish apprenticeship from other approach (Brite, 2013: 114)*

Kesepakatan SMK dan industri perlu dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Kesepakatan tersebut baik dari kompetensi, program, penempatan praktik maupun pendekatan dalam pembelajaran. SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di Dunia Kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh sebagai pekerja.

Dari beberapa hal tersebut diatas, ternyata praktik kerja industri yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki konsep yang sama dengan *Work Based Learning* (WBL) khususnya pada bentuk *apprenticeship*. SMK dan industri menyusun dan menyepakati program kerjasama penyelenggaraan praktik kerja industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sesuai pasal 11 dan pasal 12 kepmendikbud nomor 323/u/1997 praktik kerja industri merupakan bagian dari *Work Based Learning* (WBL).

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang sering terjadi pada sekolah menengah kejuruan adalah ketimpangan antara yang diajarkan di sekolah dilihat dari kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh industri otomotif. Walaupun sekolah mengajarkan sebaik mungkin, tidak mengetahui yang diinginkan oleh industri tidak akan diterima nantinya jika bekerja di sana karena memang kompetensi yang tidak sesuai.

Proses *work-based learning* secara metodologis artinya melibatkan siswa, guru, dan industri dalam penentuan tempat berlatih, dalam hal ini tempat industri. Dengan adanya pelibatan ketiga aspek ini maka paling tidak dari segi kompetensi yang diajarkan bertanya terlebih dahulu terhadap pihak industri sehingga terjadi adanya kesepahaman baik dari pihak sekolah dan pihak industri.

Praktik kerja industri yang selama ini sebagai kegiatan wajib yang harus ditempuh oleh seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan aplikasi kurikulum yang berlaku di SMK. Dalam pelaksanaan praktik kerja industri diharapkan siswa dapat menyerap kompetensi, sikap, etos kerja yang ada dalam dunia kerja. Dilakukan praktik kerja industri dikarenakan pembelajaran di sekolah saja tidak cukup untuk memenuhi kompetensi tersebut.

WBL dapat terlaksana dengan baik apabila: 1) SMK dan industri merencanakan secara bersama-sama program praktik kerja industri yang akan dilaksanakan, 2) SMK dan industri melaksanakan program WBL-T untuk program produktif meliputi teori kejuruan dan praktikum kejuruan, 3) Program WBL-T dievaluasi secara berkala oleh SMK dan industri, 4) Kesepakatan antara SMK dan industri tidak dibenarkan mengurangi pelaksanaan hak-hak siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boud D. Solomon N. (2001) *Work Based Learning: Anew higher education*. Buckingham, open university Press.
- Brite, Jan. (2013). *Arizona Work-Based Learning Resource Guide*. West Jefferson: Lynne Bodman Hall
- Finch, Curtis R. & Crunkilton, John R. (1999). *Curriculum development in vocational and technical education. planning, content, and implementation*. Sidney: Allyn and Bacon Inc.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. (2013). *Filsafat Pendidikan Teknologi, Vokasi dan Kejuruan*. Bandung: Alfabeta
- Rupert Maclean & David N. Wilson (2009) *International Handbook of Education for the Changing World of Work*. Bonn: Springer
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan (SMK)*. Jakarta : Jayakarta Agung Offset